

**ANALISA KASUS PENYALAHGUNAAN DANA  
OPERASIONAL DAN PEMERASAN BAWAHAN OLEH  
SYAHRUL YASIN LIMPO**

**Qodri Bestari<sup>1</sup>, Adila Fitriani<sup>2</sup>  
Universitas Pakuan**

**Email:** [qbestari8@gmail.com](mailto:qbestari8@gmail.com)<sup>1</sup>, [adilafitriani17@gmail.com](mailto:adilafitriani17@gmail.com)<sup>2</sup>

**Abstrak**

Korupsi diartikan sebagai suatu praktik melawan hukum yang menimbulkan kerugian ekonomi pada suatu negara atau negara. Penyalahgunaan dana operasional dan pemerasan terhadap bawahan yang dilakukan oleh SYL ini menjadi fokus penulis. SYL merupakan pelaku kasus penyalahgunaan dana operasional dan pemerasan terhadap bawahan, hal ini dibuktikan dengan keterangan di persidangan bahwa dia mengancam akan memecat dari jabatan jika menolak permintaan tersebut. Dalam penelitian ini penulis menjelaskan dampak penyalahgunaan dana operasional dan dampak sektor pertanian setelah terjadinya perkara di kementerian pertanian, mekanisme pelaporan serta penanganan kasus, tindakan apa yang dilakukan lembaga dalam menanggapi kasus ini serta melawan tindak pidana korupsi ke depannya, dan alasan pemerasan terhadap bawahan menjadi hal yang lumrah di lingkungan kementerian serta apa saja faktor - faktor yang memengaruhi terjadinya hal tersebut.

**Kata Kunci:** Korupsi, Penyalahgunaan Dana, Pemerasan.

**Abstratct**

*Corruption is defined as an unlawful practice that causes economic losses to a state or country. The misuse of operational funds and extortion of subordinates carried out by SYL is the author's focus. SYL is the perpetrator of cases of misuse of operational funds and extortion of subordinates, this was proven by his statement at trial that he threatened to fire him from his position if he refused the request. In this research, the author explains the impact of misuse of operational funds and the impact of the agricultural sector after a case occurred at the Ministry of Agriculture, the mechanism for reporting and handling cases, what actions the institution took in responding to this case and fighting criminal acts of corruption in the future, and the reasons why extortion of subordinates has become a problem. which is commonplace in the ministry environment and what factors influence this occurrence.*

**Keywords:** *Corruption, Misuse Of Funds, Extortion.*

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* (dari kata kerja *corrumpere*, yang berarti merusak, mengganggu, memutarbalikkan, menyuap, mencuri, mencuri) dan mengacu pada pejabat, termasuk politisi dan pegawai negeri serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan tersebut. Menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepada masyarakat dan komunitas lokal untuk mendapatkan keuntungan sepihak adalah hal yang normal dan ilegal. Menurut Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut “UU Pemberantasan Korupsi”), korupsi diartikan sebagai perbuatan memperoleh kekayaan atau keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau mencederai diri sendiri atau orang lain merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian ekonomi bagi negara atau negara.

Dampak tindak pidana korupsi sangat merugikan masyarakat, antara lain tidak membaiknya pelayanan publik, mahalnya layanan kesehatan, mahal biaya pendidikan, meningkatnya angka kemiskinan, dan kenaikan tarif pajak setiap tahunnya. Dampak tersebut disebabkan oleh kesalahan alokasi sumber daya yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dampak negatif korupsi ini menimbulkan kerugian yang disebut biaya sosial korupsi. Biaya sosial akibat korupsi dapat diartikan sebagai dampak negatif dari praktik korupsi yang membebani keuangan negara.

Dampak tersebut tidak hanya timbul dari jumlah nominal uang yang di korupsi, namun juga biaya yang harus ditanggung negara akibat tindakan korupsi tersebut. Biaya - biaya tersebut antara lain biaya pemberantasan korupsi, biaya proses hukum terhadap pelaku korupsi, mulai dari penyidikan hingga persidangan, bahkan biaya pendampingan pelaku korupsi di penjara. Pemberantasan korupsi nampaknya tidak membuahkan hasil dan tidak memenuhi harapan masyarakat. Oleh karena itu, para ahli meyakini korupsi bisa diberantas. Pendapat para ahli tersebut antara lain :

- a. Teten Masduki, Koordinator Komisi Pemantau Korupsi Indonesia, menilai korupsi hanya bisa diberantas jika melibatkan mayoritas masyarakat. Artinya, masyarakat dapat memperoleh informasi dan menyampaikan pengaduan terhadap pejabat publik yang diduga melakukan tindak pidana korupsi.
- b. Pakar politik Amerika Daniel Leff berpendapat bahwa pemberantasan korupsi, yang telah mendarah daging sejak masa demokrasi, tidak mungkin dilakukan tanpa reformasi kelembagaan terlebih dahulu. Jika konstitusi pemerintahan saat ini tetap sama dengan konstitusi lama, maka hanya ada sedikit manfaat dari pergantian pemerintahan.

Penyalahgunaan dana operasi dan pemerasan bawahan yang dilakukan oleh mantan menteri pertanian menjadi fokus penulis dalam melakukan penelitian penulisan jurnal. SYL adalah pelaku dalam perkara penyalahgunaan dana operasi dan pemerasan terhadap bawahannya, hal ini dibuktikan dengan adanya Sekretariat, Ditjen, dan berbagai instansi di lingkungan kementerian diminta menyerahkan 20% anggarannya kepada SYL seolah - olah berhutang budi dan diancam diberhentikan dari jabatannya jika terbukti mengundurkan diri kesaksian di persidangan.

Dalam penelitian ini, penulis menjelaskan secara rinci apa modus yang dilakukan, bagaimana dampak penyalahgunaan dana operasional kementerian pertanian bagi sektor pertanian itu sendiri, bagaimana mekanisme pelaporan dan penanganan perkara, apa langkah - langkah yang telah diambil lembaga negara dalam menanggulangi korupsi, dan apa alasan praktik pemerasan terhadap bawahan menjadi umum dalam lingkungan kementerian serta faktor yang memengaruhinya. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran rinci tentang korupsi sebagai masalah sosial dan hukum yang terkait dengannya. Kasus penyalahgunaan dana dan pemerasan terhadap bawahan Syahrul Yasin

Limpo menjadi kasus yang menarik perhatian dan perdebatan luas di masyarakat dan sistem peradilan. Konteks tinjauan ini mencerminkan pentingnya analisis kasus korupsi berdasarkan waktu. Beberapa unsur yang mendukung konteks surat kabar ini adalah :

- a) Kebijakan untuk melindungi korban pemerasan. Pemerasan adalah tindakan memaksa seseorang untuk memberikan barang atau membuat utang dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan seperti mengungkapkan informasi negatif tentang mereka yang menjadi korban pemerasan tersebut dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak.
- b) Dampak bagi sektor pertanian pasca perkara ini. Sektor pertanian berpengaruh dalam keberlangsungan kehidupan masyarakat Indonesia. Kepercayaan rakyat terhadap kementerian pertanian itu sendiri dan lunturnya norma sosial selain itu juga berdampak pada kualitas pertanian serta menurunnya kualitas pangan rakyat.
- c) Peran media massa dalam perkara ini. Media sosial dan media berperan penting dalam menyoroti kejadian seperti ini. Analisis rangkaian waktu dapat membantu menilai pengaruh media dan reaksi masyarakat terhadap kasus - kasus seperti ini.
- d) Solusi yang dilakukan lembaga negara. Lembaga negara seperti KPK berperan penting dalam menyelesaikan perkara seperti ini. KPK melakukan peranan yang sesuai dengan amanah dalam pasal 3 Undang - Undang No. 30 Tahun 2002 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang KPK yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan apa pun (memengaruhi tugas dan wewenang KPK).

Dengan memahami konteks tinjauan ini, penulis dapat menentukan pentingnya analisis kronologis dalam mengeksplorasi berbagai aspek penyalahgunaan dana dan pemerasan bawahan yang dilakukan SYL dan dampaknya terhadap keseluruhan sistem hukum dan sosial serta dampak bagi korban yang mengalami kejadian hal ini.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode normatif yaitu mempelajari pokok bahasan hukum dengan mempertimbangkan seluruh asas hukum yang berpedoman pada konsep, teori dan hukum, yaitu metode pendekatan. Hal ini merupakan bagian dari keterkaitan norma - norma yang terdapat dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk memastikan penelitian yang sempurna untuk artikel ini, penulis juga menggunakan metode observasi. Ini adalah metode fasilitatif lain dalam mengamati rangkaian peristiwa di masa lalu dan merangkum setiap situasi yang tampaknya penting untuk digunakan dalam pembelajaran di masa depan. Suatu penelitian dimana penulis melakukan penelitian dari segala sumber yang memberikan informasi kepada penulis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Modus Operandi dalam Penyalahgunaan Dana**

Merujuk kepada temuan dalam gelar perkara KPK pada tanggal 13 Juni 2023 dan pemeriksaan sekitar 70 orang eselon I - III, SYL diduga kuat meminta upeti kepada bawahannya yang sedang merencanakan naik jabatan. Beliau (Menteri Pertanian SYL) menggunakan seluruh biaya tersebut untuk keperluan operasional dan memperkaya diri sendiri serta orang - orang terdekatnya. Faktanya, menurut kesaksian pejabat USDA, dia menghabiskan sebagian uangnya untuk hal - hal yang tidak perlu seperti karaoke dan menyewa jet pribadi. Agar alur ceritanya lebih lancar, SYL didukung empat aktor lain yang punya perannya masing - masing. Diantaranya adalah Kasdi Subagyo, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian.

Kasdi berperan mengatur dan mengawasi tiga orang sebagai koordinator untuk mencari pejabat tinggi yang bersedia di naik jabatan. Pengumpulan uang akan dikumpulkan dari Kasdi dan diteruskan ke SYL. Bawahan Pak Kasdi yang sedang mencari anggota adalah Imam Mujahideen Fahamid, pejabat khusus Kementerian Pertanian yang

membidangi kebijakan pertanian. Imam tidak menerima uang itu. Ia memanfaatkan 4.444 tangan Zulkifli, Direktur Personalia dan Organisasi Kementerian Pertanian, sebagai "pemilih". SYL sudah tidak asing lagi bagi para Imam. Berbeda dengan para imam, Hatta mencari dan menawarkan anggota yang menginginkan promosi tanpa melibatkan orang lain. Hatta meminta uang kurang dari Rp 200 juta dari yang diminta Imam untuk promosi menjadi anggota SYL.

Muhammad Hatta bergabung dengan Kementerian Pertanian pada tahun 2020. Pada saat itu, orang-orang mulai membicarakan tentang pupuk. Dalam dokumen KPK, Hatta mengajukan gugatannya sendiri. Ia dituduh melakukan penyalahgunaan dalam pengadaan pupuk bersubsidi, dan beberapa pejabat Kementerian Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sedang diperiksa sehubungan dengan masalah tersebut. Berdasarkan informasi yang beredar, kenaikan gaji dari 250 juta rupiah menjadi 300 juta rupiah per orang belum ditentukan secara langsung dan akan di cicil selama setahun. Selain itu, Syahrul menambahkan biaya pada anggaran vendor yang bekerja sama dengan Kementerian Pertanian pada proyek yang sedang berjalan.

Dia mengatakan dana yang digunakan berasal dari anggaran Kementerian Pertanian yang di manipulasi, termasuk pembayaran kepada pemasok yang mengerjakan proyek Kementerian Pertanian. Tanak mengatakan, dana tersebut dihimpun oleh Kasdi Subajiono, Sekretaris Kementerian Pertanian, dan Muhammad Hatta, Direktur Departemen Permesinan Pertanian Kementerian Pertanian. Pajak kemudian di bayarkan kepada Kasdi dan Hatta dengan berbagai cara seperti melalui uang tunai, transfer bank, atau pembayaran barang atau jasa. Tanak yang mendapat perintah dari Syahrul mengatakan, Kasdi dan Hatta memerintahkan anak buahnya untuk memungut pajak dalam jumlah yang bervariasi. "Besaran tarif yang ditetapkan SYL adalah \$4.000 hingga \$10.000," kata Tanak.

#### **Langkah yang diambil oleh KPK dan LPSK**

KPK memperpanjang penahanan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan tersangka kasus korupsi Kementerian Pertanian lainnya. SYL dan rekan-rekannya akan ditahan tambahan selama 30 hari. Tim penyidik memutuskan memperpanjang masa penahanan tersangka SYL hingga 8 Januari 2024. Informasi tersebut disampaikan Direktur Media KPK Ali Fikri kepada wartawan melalui keterangan tertulis, Jumat. Ali menjelaskan, penahanannya diperpanjang oleh ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sementara itu, jadwal pemanggilan dan pemeriksaan saksi untuk melengkapi berkas perkara juga akan terus dicermati. Dia mengatakan, selain perlindungan fisik, tim LPSK juga bekerja sama dengan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait ruang khusus pengadilan tipikor.

Usai pengambilan sumpah jabatan di hadapan Presiden Joko Widodo, Susi pun menegaskan organisasinya akan menjalankan tugasnya sesuai amanah yang tertuang dalam konstitusi. Selain kejadian SYL, Susi menyarankan agar masyarakat

Indonesia tidak segan-segan meminta bantuan LPSK di kemudian hari. "Kami berkomitmen untuk melanjutkan kewajiban dan tanggung jawab kami untuk melindungi saksi dan korban kejahatan di Indonesia sesuai dengan hukum yang berlaku," ujarnya. Kedua tersangka ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi telah melarang mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo beserta istri dan anak-anaknya bepergian ke luar negeri selama enam bulan. Upaya preventif dilakukan untuk mengusut dugaan kasus korupsi di Kementerian Pertanian RI. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah meminta larangan perjalanan internasional terhadap sembilan orang untuk membantu penyelidikan tuduhan korupsi di Kementerian Pertanian Indonesia. 9 orang merupakan pihak yang bersalah dan rekannya.

#### **Mekanisme Pelaporan dan Penanganan Perkara**

##### **1) Pelaporan Syahrul Yasin Limpo oleh KPK**

Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo atau akrab disapa SYL ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi di sebuah penginapan di kawasan WIB Jakarta Selatan pada Kamis, 12 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 WIB. Dia dibawa paksa setelah tidak memenuhi panggilan pemeriksaan. Plt Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi, Asep Guntur menjelaskan alasan penangkapan SYL. Pekan lalu, Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK) melayangkan surat panggilan pemeriksaan pada Rabu, 11 Oktober 2023. Namun Syahrul tak hadir saat menjenguk ibunya di Makassar, Sulawesi Selatan.

“Dia kemudian kembali ke Jakarta dan tentunya perjalanannya kami pantau. Ini untuk mengambil penerbangan terakhir pagi - pagi sekali,” ujarnya, Jumat 13 Oktober 2023, di KPK Merah Putih, saya sampaikan di rumah. Dengan angka tersebut, alokasi ke seluruh departemen di Kementerian Pertanian bisa mencapai Rp 23 miliar setiap tahunnya. Pada 28 September, KPK menggeledah rumah dinas Syahrul Yasin Limpo. KPK melakukan penggeledahan di rumah dinas Syahrul yang dibenarkan Ali Fikri. Benar ada aktivitas tim KPK di sana, kata Ali saat dikonfirmasi, Kamis 28 September 2023.

Namun Ali tidak merinci lebih lanjut mengenai hasil pencarian tersebut. “Kegiatan sedang berlangsung,” katanya. Saat dimintai konfirmasi, Kepala Komunikasi Kementerian Pertanian Arif Kahyono mengaku belum mengetahui informasi tersebut. “Saya baru saja mendengarnya. “Saya belum mendapat informasi apa pun,” kata Arif. Namun, dia enggan membahas identitas tersangka yang dimaksud. Pada 4 Oktober, Syahrul Yasin Limpo kembali ke Indonesia karena tidak bisa dihubungi lagi. Dia gagal kembali dari jadwal kunjungan kerja ke Eropa dan dilaporkan hilang.

Tiba di Indonesia pada malam tanggal 4 Oktober 2023 dari kunjungan ke Eropa. Syahrul tiba menggunakan pesawat Singapore Airlines rute Singapura - Cengkareng, nomor penerbangan SQ964. Sekretaris Keuangan Partai Nas Demokrat Ahmad Saloni membenarkan Syahrul kehilangan kontak dengan rekan - rekannya. Ia menjelaskan, Syahrul harus tinggal lama di Eropa untuk mengatasi masalah prostatnya. Syahrul Yasin Limpo kemudian dipanggil kembali secara resmi, namun tidak hadir di pengadilan pada 11 Oktober.

## 2) Penanganan Perkara dalam Persidangan

### a) Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum

Syahrul Yasin Limpo didakwa dengan ancaman pidana dalam pasal 12 huruf e jo pasal 18 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Kasdi Subagyo didakwa dengan ancaman pidana dalam pasal 12 huruf e jo pasal 18 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

### b) Tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum

Syahrul Yasin Limpo dituntut berupa pidana penjara selama 12 tahun dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidi pidana 6 bulan serta membayar uang pengganti sebesar Rp.44.269.777.204.00 (empat puluh empat miliar dua ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus empat rupiah) dan USD 30.000 (tiga puluh ribu dollar amerika serikat).

Kasdi Subagyo dituntut berupa pidana penjara selama 6 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidi kurungan selama 3 (tiga) bulan.

### c) Pledoi oleh Penasihat Hukum

Isi pledoi Syahrul Yasin Limpo : Pertama, terdakwa tidak melakukan perbuatan yang didakwakan dan dituntut, dan perbuatan pemerasan tidak pernah dilakukan terdakwa. Kedua, insan Kementan yang melakukan pendekatan salah satunya dengan melayani keluarga terdakwa seolah - olah memang bagian dari hak dan fasilitas dari seorang menteri beserta keluarganya dengan harapan jabatannya aman bahkan naik. Ketiga, terdakwa tidak dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana karena tidak terdapat niat jahat (mens rea) karena semua yang telah dilakukan dan yang terjadi tanpa seizin terdakwa namun berasal dari inisiatif dan dikerjakan oleh pejabat di Kementerian Pertanian. Keempat, jejak kehidupan pribadi dan riwayat pengabdian terdakwa yang sarat dengan prestasi, integritas

dan tidak berperilaku koruptif. Kelima, terdakwa mohon putusan bebas atau putusan yang seadil - adilnya.

Isi pledoi Kasdi Subagyo : Pertama, permintaan uang dengan praktik sharing ini bukan inisiatif terdakwa melainkan inisiatif dan perintah dan atasan dalam hal ini. Kedua, terdakwa hanya meneruskan perintah permintaan uang tersebut kepada Eselon 1 dan selanjutnya diteruskan lagi ke Eselon 2. kahi, kepala badan dan pejabat ditingkat bawah melalui perintah yang dikenal dengan istilah "perintah berjenjang". Ketiga, perintah permintaan uang tersebut tidak hanya melalui terdakwa melainkan ada yang melalui Imam Mujahidin, Fahmid Momon Rusmono di tahun 2020 : Panji Harjanto : Muhammad Hatta dan ada juga yang langsung Eselon 1, Kabi di Kesekjenan, Kepala Badan di Direktorat lainnya, serta melalui Joice Triatman, sehingga banyak permintaan uang yang tidak diketahui oleh terdakwa. Keempat, bagaimana bawahan memenuhi permintaan uang tersebut bukan atas arahan atau petunjuk terdakwa, tetapi sepenuhnya inisiatif Eselon 1. Eselon 2 dan pejabat di tingkat bawah apakah itu untuk meminjam ke vendor atau memotong anggaran, melakukan SPJ fiktif atau markup terdakwa hanya mengingatkan bawahan agar memenuhi permintaan uang tersebut, hal itu pun atas perintah atasan. Kelima, praktik sharing sudah terjadi sejak tahun 2020 pada zaman kesekjenan Momon Rusmono, terdakwa menjabat selaku Direktur Perkebunan justru pihak yang dipaksa untuk untuk sharing, sehingga terdakwa hanya melanjutkan praktik dan kebiasaan yang sudah lama terjadi di Kementan, itu pun atas perintah atasan. Keenam, terdakwa tidak ada menerima atau menikmati keuntungan materi dari perkara ini dan hasil pengumpulan uang melalui praktik sharing.

d) Putusan Hakim

Vonis Syahrul Yasin Limpo : Pertama, menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan "tindak pidana korupsi secara bersama - sama dan berlanjut" sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum. Kedua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun dan denda sejumlah Rp300.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan. Ketiga, menghukum terdakwa tersebut untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp14.147.144.786 (empat belas miliar seratus empat puluh tujuh juta seratus empat puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah) dan USD 30.000 (tiga puluh ribu dollar amerika serikat), paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan.

Vonis Kasdi Subagyo : Pertama, menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan "tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum. Kedua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

**Dampak Pasca Perkara terhadap Sektor Pertanian**

a) Kualitas Pertanian Berkurang

Dengan ironis, kasus korupsi yang terjadi di lembaga yang menangani kebutuhan pangan berlangsung bersamaan dengan penurunan kinerja sektor pertanian. Berdasarkan publikasi terbaru dari Badan Pusat Statistik, sektor pertanian menjadi satu - satunya sektor yang mengalami kontraksi pada triwulan I-2024. Dengan tingkat pertumbuhan -3,54% secara tahunan, sektor ini jauh tertinggal dari pertumbuhan nasional yang mencapai 5,11% di tengah ketidakpastian yang tinggi. Sejarah mencatat, setidaknya sejak 2011, baru kali ini terjadi kontraksi sektor pertanian.

Dalam beberapa kesempatan, tim kuasa hukum SYL juga menyatakan keberatan karena berbagai pihak terus mengungkap sisi negatif SYL akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan. Padahal, SYL dinilai cukup berperan dalam menyelamatkan sektor pertanian selama masa pandemi. Tidak dapat disangkal, pertanian pernah menjadi salah satu sektor yang mampu mempertahankan pertumbuhan positifnya ketika hampir semua sektor ekonomi menurun. Sepanjang tahun 2020 hingga 2022, saat pandemi berada pada titik terburuk, nilai tambah pertanian tetap stabil.

Dari tahun 2019 hingga triwulan I-2024, rata - rata laju pertumbuhannya hanya sekitar 1,91%. Jika periode pengamatan dimulai sejak triwulan IV-2019, ketika SYL mulai menjabat, rata - rata pertumbuhannya hanya 1,66%. Hanya setengah dari rata-rata pertumbuhan sepanjang 2011-2018, yaitu sekitar 3,99% per triwulan. Lebih meresahkan, di antara semua subsektor pertanian, tanaman pangan tercatat cukup sering mengalami kontraksi, terutama dalam dua tahun terakhir.

**b) Pembatalan Kontrak Ihwal dan Alsintan**

Plt Menteri Pertanian Arif Prasetyo Adi telah membatalkan seluruh perjanjian mengenai alat dan mesin pertanian atau alshintan di Kementerian Pertanian. Dia mengatakan sejauh ini sembilan perjanjian telah dilanggar. Pencabutan tersebut dipicu dugaan korupsi yang melibatkan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan beberapa pejabat Kementerian Pertanian. Arif menjelaskan, penghentian perjanjian tersebut terkait dengan ditetapkannya Direktur Dinas Alat dan Mesin Pertanian Muhammad Hatta sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Diketahui, Muhammad Hatta terlibat dalam peristiwa tersebut bersama mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dan mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Kasdi Subajiono. Oleh karena itu, ia meminta Ali Jamil, Direktur Prasarana dan Sarana Pertanian Departemen, menjelaskan dan mempertimbangkan penataan mesin pertanian yang sedang berjalan, termasuk peningkatan penggunaan mesin pertanian yang ada. Arief juga menyarankan agar Dirjen PSP mengevaluasi perjanjian tersebut dari segi harga, kualitas produk, dan cara transaksi.

Jika prosesnya bisa dilakukan secara digital dengan menggunakan e-katalog, maka tidak perlu ada negosiasi, tegas Arif. Kementerian Pertanian membatalkan 10 kontrak mesin pertanian yang masing - masing bernilai lebih dari Rp 500 juta. 4.444 mesin pertanian yang dicat tersebut merupakan kebutuhan hulu yang terdapat di seluruh Indonesia. Ali Jamil, Direktur Departemen Penyediaan Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, mengatakan kementerian telah membatalkan 10 kontrak mesin dan peralatan pertanian. Penghentian perjanjian tersebut berdasarkan surat Irjen Departemen Pertanian yang telah ditinjau. Sebelumnya, Pj Menteri Pertanian Arief Prasetyo Adi mengumumkan pembatalan seluruh kontrak mesin pertanian mulai 6 Oktober 2023, setelah itu dilakukan peninjauan terhadap kualitas mesin, harga, dan cara transaksi. Terkait kontrak selanjutnya, kami meminta agar tahapan perjanjian kontrak dilakukan dengan menggunakan katalog elektronik.

**Peran Media Massa dan Media Sosial terhadap Korupsi**

**a) Mengungkap Kasus Korupsi melalui Media Massa**

Media massa memainkan peran penting dalam perjuangan melawan korupsi di Indonesia karena media massa dapat digunakan untuk mengungkap dan menyelesaikan masalah dengan cepat. Media massa sebaiknya menggunakan berbagai saluran seperti berita, televisi, radio, surat kabar, majalah, dan media sosial untuk memberitakan isu korupsi terkini di Indonesia di tingkat pegawai negeri sipil, pemerintah daerah, dan berbagai institusi lainnya. Selain itu, media massa juga memengaruhi pandangan dan reaksi masyarakat terhadap korupsi, karena korupsi berdampak negatif terhadap kesejahteraan dan pembangunan masyarakat. Media massa berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap korupsi dengan memberikan informasi yang relevan mengenai kasus - kasus korupsi. Penyebaran berita kasus korupsi dalam kerangka opini publik diharapkan dapat menciptakan kontrol publik dan mendorong masyarakat mengambil langkah - langkah yang diperlukan untuk mengatasi kasus korupsi yang ada.

Media massa berperan penting dalam mengungkap peristiwa korupsi di Indonesia, mengarahkan opini publik yang benar terhadap korupsi, menyebarkan informasi, mendidik, bahkan menjadi bagian opini publik yang kuat dan aktif dalam memerangi kejahatan korupsi. Bukti meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap korupsi terlihat dari meningkatnya pesan - pesan antikorupsi di media. Namun, untuk menghormati kebenaran, media harus mengedepankan fakta yang akurat dan menyajikan berita yang bermanfaat untuk membantu masyarakat memahami dan lebih cepat mencegah terjadinya peristiwa korupsi. Saat ini, hampir seluruh aktivitas jurnalistik memerlukan interaksi antara media dan publik untuk membangun fakta guna mengungkap berbagai kasus korupsi yang terjadi di

Indonesia. Hal ini menciptakan lingkungan sosial yang bebas korupsi, sehingga menghasilkan keamanan ekonomi dan struktur sosial yang lebih baik. Oleh karena itu, media massa berperan penting dalam mengungkap kasus korupsi di Indonesia.

**b) Mengungkap Kasus Korupsi melalui Media Sosial**

Media sosial terbukti berperan dalam mengungkap kasus korupsi, baik langsung maupun tidak langsung. Dengan bantuan pengguna internet, pelaku korupsi berhasil ditangkap dan aset yang tersembunyi tampaknya dapat terungkap. Menurut kriminolog Josias Simon, kasus korupsi termasuk kategori yang sulit untuk diungkap karena kompleksitasnya. Selain itu, petunjuk dalam perkara korupsi sering sulit ditemukan karena telah diubah menjadi bentuk atau barang lain. Sementara itu, aparat penegak hukum bekerja sesuai dengan aturan yang memiliki batasan. Demikian juga, ketika sebelumnya aset dicatat di bawah nama orang lain, sekarang uang hasil kejahatan dicampur dengan penanaman modal yang legal. Uang dari tindak kriminal juga diputar melalui perusahaan cangkang atau di transfer ke bank luar negeri. Menghadapi kasus yang kadang kompleks, ujar Josias, media sosial memiliki potensi untuk membuka jalan dalam menyelesaikan kebuntuan.

Karena kemudahannya di akses, siapa saja dapat memberikan informasi yang relevan untuk ditindaklanjuti oleh penegak hukum. 'Itu bisa menjadi petunjuk, bukan bukti. Menurut peneliti Pusat Anti korupsi Universitas Gadjah Mada, Zaenur Rohman, beberapa kasus korupsi tersebut terungkap melalui peran pengguna internet, bukan berawal dari penyelidikan oleh penegak hukum. Seperti dalam kasus yang melibatkan pejabat Kementerian Keuangan, pengguna internet berperan sebagai 'pemburu' pejabat yang menampilkan gaya hidup mewah di media sosialnya, kemudian penegak hukum baru menindaklanjuti. Di sisi lain, menurut Zaenur, kasus ini menunjukkan lemahnya deteksi awal atau pengawasan dari otoritas terkait, termasuk oleh penegak hukum. Akibatnya, penegakan hukum berjalan berdasarkan viralitas di media sosial, bukan karena pengawasan internal atau penyelidikan.

**Kebijakan Hukum dan Perlindungan Korban Pemerasan**

**a) Kebijakan Hukum terhadap Korban Pemerasan**

Pengimplementasian hukum adalah aspek krusial dalam mewujudkan supremasi hukum dalam aspek masyarakat. Undang - Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, di mana wewenang didasarkan pada hukum, bukan sekadar wewenang belaka. Ini menekankan pentingnya kekuatan penegakan hukum dengan kekuatan fisik yang didasarkan pada wewenang yang sah. Perlindungan hukum meliputi upaya untuk menjaga komponen hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk sanksi - sanksi bagi pelanggar. Hal ini mencakup kepastian hak dan kewajiban entitas dalam mencapai kebutuhan pribadi serta interaksi dengan orang lain.

Perlindungan hukum dapat bersifat pasif maupun aktif. Perlindungan pasif mencakup perbuatan di luar peradilan yang memberikan apresiasi dan kepastian terhadap hak - hak pelaku dan korban. Sementara perlindungan aktif ikut upaya pemenuhan hak-hak, baik secara preventif maupun represif. hukuman pidana, yang sering disebut sebagai pidana, adalah ancaman hukuman yang digunakan untuk merehabilitasi tingkah laku pelaku kejahatan. Namun, kadang - kadang hukuman pidana juga berfungsi sebagai ancaman dan ganjaran untuk pelaku kejahatan. Dalam konteks tindak pidana pengancaman dan pemerasan, langkah - langkah alternatif harus dipertimbangkan untuk mengurangi tindak pidana tersebut. Langkah - langkah ini dapat menyertakan usaha preventif dan represif, serta penerapan hukuman yang tepat sesuai dengan hukum yang berlaku.

**b) Perlindungan Korban Pemerasan menurut Undang - Undang**

Perlindungan hukum bagi korban kejahatan intimidasi dan pemerasan diatur dalam Undang - Undang Perlindungan Saksi dan Korban, khususnya pasal 5, yang menyatakan bahwa korban harus menjamin keselamatan diri, keluarga, dan harta bendanya serta melindungi dirinya dari ancaman terkait kamu punya hak untuk bebas. Artinya, untuk pernyataan yang sedang atau sedang dibuat. Pasal 12 UU PSK mengatur bahwa LPSK mempunyai kewenangan untuk melakukan berbagai tindakan, antara lain permintaan informasi, klarifikasi dokumen, permintaan informasi riwayat kasus, dan perubahan identitas yang dilindungi.



Lebih lanjut, Pasal 7 ayat UU PSK mengatur bahwa korban kejahatan berhak mendapatkan kompensasi terkait pelanggaran HAM berat, kompensasi korban kejahatan teroris, dan hak - hak lain yang diatur dalam undang - undang. Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2018 menyatakan bahwa surat permohonan ganti rugi, penggantian dan bantuan bagi saksi dan korban harus diajukan ke pengadilan melalui LPSK. Sedangkan, dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah tersebut mengatur bahwa korban berhak mendapatkan ganti rugi berupa ganti rugi atas kehilangan harta benda atau penghasilan, penderitaan yang berkaitan langsung dengan kejahatannya, dan biaya pengobatan medis dan/atau psikologis.

## **KESIMPULAN**

SYL diduga dengan kuat meminta upeti kepada semua bawahannya yang berencana untuk naik jabatan. Untuk memperlancar aksinya, SYL dibantu oleh 4 aktor lain yang memiliki peran masing - masing. Mereka, antara lain, ialah Kasdi Subagyo yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian. Peran Kasdi sebagai koordinator, yang bertugas mengatur dan mengawasi tiga orang, dalam mencari pejabat publik eselon yang memiliki keinginan untuk meraih peningkatan jabatan. Dalam upaya mendukung penyidikan dugaan korupsi di Kementan RI, KPK telah meminta agar 9 orang tidak diperbolehkan melakukan perjalanan ke luar negeri.

Dengan ironis, kasus korupsi yang terjadi di lembaga yang menangani kebutuhan pangan berlangsung bersamaan dengan penurunan kinerja sektor pertanian. Berdasarkan publikasi terbaru dari Badan Pusat Statistik, sektor pertanian menjadi satu - satunya sektor yang mengalami kontraksi pada triwulan I-2024. Dengan tingkat pertumbuhan -3,54% secara tahunan, sektor ini jauh tertinggal dari pertumbuhan nasional yang mencapai 5,11% di tengah ketidakpastian yang tinggi. Sejarah mencatat, setidaknya sejak 2011, baru kali ini terjadi kontraksi sektor pertanian.

Media massa berperan signifikan dalam membongkar kasus korupsi, membimbing pendapat masyarakat yang tepat mengenai korupsi, dan menjadi bagian dari pendapat masyarakat yang kuat serta aktif dalam menyebarkan informasi, edukasi, dan bahkan penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia. Bukti dari meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap korupsi dapat dilihat dari semakin banyaknya berita anti korupsi yang bermunculan di media. Namun, demi menghormati kebenaran, media harus mengutamakan fakta yang akurat dan memberikan berita yang bermanfaat bagi publik, sehingga masyarakat dapat memahami mengenai peristiwa korupsi yang terjadi dan beraksi lebih cepat untuk mencegah hal tersebut.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- <https://nasional.tempo.co/read/1783885/kronologi-kasus-syahrul-yasin-limpo-sempat-hilang-kontak-ditangkap-kpk-kontroversi-firli-bahuri-teken-penangkapan>
- <https://validnews/kementan-batalkan-10-kontrak-alsintan-per-kontrak-di-atas-rp500-juta4>
- <https://www.kompas.id/ironi-korupsi-syahrul-yasin-limpo-dan-merosotnya-kinerja-sektor-pertanian4>
- <https://news.detik.com/kpk-perpanjang-masa-penahanan-syahrul-yasin-limpo-dkk-30-hari4>
- <https://www.tempo.com/dampak-kasus-syahrul-yasin-limpo-arief-prasetyo-batalkan-seluruh-kontrak-alat-pertanian-bermasalah-1321034>
- <https://www.cnnindonesia.com/kpk-cegah-menteri-pertanian-syahrul-yasin-limpo-ke-luar-negeri4>
- <https://www.sawitku.id/cek-fakta-begini-modus-operandi-mentan-memeras-bawahan4>
- <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/05/03/medsos-dan-korupsi-mengungkap-yang-tersembunyi>
- <https://repository.uki.ac.id/HalJudul-DaftarIsi-DaftarGambar-DaftarTabel-DaftarSingkatan-DaftarLampiran-Abstrak4>
- <https://www.kompasiana.com/lailanadliya0744/peran-media-massa-dalam-mengungkap-kasus-korupsi-di-indonesia>